

BAB V

KESIMPULAN

Situasi berubah di tahun 2007 seraya Cina mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Nyatanya, Cina telah memperluas jangkauan militernya, mengukuhkan klaim yurisdiksi di wilayah Laut Cina Selatan, dan menganut kebijakan yang lebih keras guna meremehkan berbagai klaim yang telah diajukan oleh negara-negara lain. Dengan alasan-alasan mendasar yang dapat ditelusuri pada peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri Cina, penguatan nasionalisme serta berkembangnya rasa tidak puas Cina atas campur tangan pihak asing di dalam konflik Laut Cina Selatan, sebagian besar dari legitimasi diplomasi “soft power” Cina hancur di dalam waktu yang singkat. Legitimasi tersebut bahkan menjadi lebih lemah lagi di tahun 2010 dengan adanya provokasi politik dan militer antara Washington dan Beijing saat Cina menyatakan Laut Cina Selatan sebagai salah satu kepentingan utama layaknya Tibet dan Taiwan dan mengadakan latihan militer di wilayah tersebut. Situasi menjadi semakin tegang seraya Cina semakin tegas menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan.

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, harus ditekankan di sini bahwa sikap tegas yang diambil oleh Cina bukanlah suatu kejutan bagi ASEAN (bertentangan dengan reaksi negara-negara Barat). Negara-negara anggota ASEAN tidaklah tertipu dengan “serangan daya pikat” (charm offensive) Cina seperti yang telah dilansir oleh sebagian analis. Sebaliknya, mengutip pernyataan Dewi Fortuna

Anwar, negara-negara anggota ASEAN “telah dan senantiasa waspada terhadap janji-janji dan bahaya-bahaya inheren yang ditunjukkan Cina” dan percaya bahwa “jalan terbaik dalam berhubungan dengan Cina adalah dengan melibatkan dan mengintegrasikan Cina secara menyeluruh dalam tatanan regional.”⁶⁰

Selama tiga tahun terakhir, telah muncul sinyal beragam dari Beijing. Di satu sisi, berbagai langkah telah ditempuh untuk melunakkan sikap Cina. Cina telah menerima berbagai pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan Declaration of Conducts (DOC) tahun 2002 yang diusulkan ASEAN. Suatu upaya diplomatik untuk meyakinkan dunia atas niat damai Cina telah dimulai, termasuk di dengan terbitnya buku putih (white paper) pada 6 September 2011 yang menegaskan bahwa Cina akan mengikuti petunjuk Deng Xiaoping dan akan mengesyampingkan pertentangan di Laut Cina Selatan guna bekerjasama dalam pembangunan.

Pada sisi yang lain, Cina telah berupaya dalam memecah belah ASEAN dengan membujuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand untuk tidak membicarakan konflik Laut Cina Selatan. Itikad baik Cina sebenarnya juga dapat dipertanyakan. Sebagai contoh, setelah Filipina dan Cina menemui jalan buntu pada tahun 2012 soal beting Scarborough (Shoal Scarborough), Cina tidak mematuhi kesepakatan lisan untuk angkat kaki bersama-sama dari wilayah tersebut. Cina justru menutup mulut laguna tersebut untuk mencegah kembalinya aparat Filipina dan menyelenggarakan patroli di sekitar beting Scarborough. Ini hanya merupakan satu contoh.

⁶⁰ Dewi Fortuna Anwar, “Between Asean, China and the United States,” *Jakarta Post*, 30 August 2010

Meski demikian, ada upaya untuk menguatkan kerjasama dan mengembalikan kepercayaan yang hilang itu saat Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang mengunjungi Asia Tenggara bulan Oktober tahun lalu. Xi mengusulkan untuk mempererat hubungan Cina-ASEAN dengan membentuk suatu “komunitas dengan tujuan bersama” (community of common destiny). Perdana Menteri Li juga berupaya dengan menegaskan bahwa Cina dan ASEAN seharusnya mempromosikan “kehidupan bertetangga dan kerjasama yang bersahabat antara Cina dan negara-negara ASEAN.”

Selama periode 1989-2007 terlihat dengan jelas adanya efek yang positif dan nyata dari pendekatan “soft power” yang ditempuh kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun mungkin telah ada efek yang nyata, daya tahan “soft power” untuk jangka waktu panjang sepertinya kurang jelas. Pada saat ini, seraya niat Cina telah dipertanyakan, dampak dari diplomasi “soft power” Cina di Asia Tenggara sangat terbatas. Kepercayaan yang dibangun dengan susah payah sebagian besar telah hancur semenjak 2007. Cina menyadari hal ini dan telah berupaya untuk berubah guna merebut kembali kepercayaan yang telah hilang. Akan tetapi, sangat diragukan hal ini akan berhasil, terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Cina. Keterlibatan ASEAN telah menjadi lebih pragmatis, dengan penekanan lebih pada penyetaraan secara halus (soft balancing), atau pemagaran (hedging), terhadap Cina. Negara-negara anggota ASEAN sendiri telah menjadi terbagi-bagi tentang bagaimana seharusnya konflik Laut Cina Selatan diselesaikan (apakah secara multilateral atau bilateral); hal ini dapat melemahkan kemungkinan berhasilnya “constructive engagement” yang hendak dicapai. Akan tetapi, telah ada dampak mendasar dari “constructive engagement”

tersebut. Penerimaan Cina secara umum dan institusionalisasi dari “cara ASEAN” serta penerimaan atas institusi-institusi yang digerakkan oleh ASEAN terus-menerus berlangsung, dan hal ini mengakibatkan perubahan yang melibatkan berbagai gagasan dan norma yang telah terjadi.

Keterlibatan secara positif melalui diplomasi “soft power” secara timbal balik bukannya tidak berguna. Keterlibatan secara positif telah berkontribusi terhadap pembentukan hubungan regional yang positif secara keseluruhan, menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Cina dan Asia Tenggara pada saat yang bersamaan. Seandainya saja tidak ada keterlibatan secara timbal balik dengan pendekatan “soft power,” situasi di Asia Timur akan terlihat sangat jauh berbeda sekarang. Sebuah tatanan regional yang baru telah terbentuk melalui berbagai upaya oleh kedua belah pihak untuk bersosialisasi satu sama lain. Hubungan-hubungan yang dinormalisasi telah dipertahankan. Cina tetap terus melibatkan diri dalam organisasi-organisasi regional dan internasional yang dipimpin oleh ASEAN dan mempromosikan model-model mereka sendiri. Lebih jauh lagi, tatanan tersebut telah terbentuk di atas nilai-nilai bersama, yang merupakan nilai-nilai regional, bukan nilai-nilai yang dipaksakan secara eksternal.